



## MPBI DIY: Distribusi dan Besaran BSU Perlu Dievaluasi

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan gaji Rp3,5 juta ke bawah. Bantuan senilai Rp600 ribu untuk bulan Juni dan Juli tersebut diberikan dalam satu tahap.

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan BSU merupakan langkah jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah ketimpangan sosial dan struktural di sektor tenaga kerja.

Ia juga menyoroti penyaluran BSU yang tidak serentak, bahkan dalam satu kantor. "Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaktertiban dalam proses verifikasi dan penyaluran. Ini jadi catatan serius bahwa mekanisme distribusi perlu dievaluasi agar lebih adil dan merata," katanya, Kamis (10/7).

Irsad menyebut, mestinya cakupan BSU diperluas dan menasar pekerja informal. Hal itu karena mayoritas pekerja berada di sektor informal. Calon penerima BSU di DIY hanya sekitar 320 ribu, sedangkan jumlah pekerja di DIY sekitar 2,15 juta.

Menurut dia, ada pembatasan kuota yang tidak berdasarkan kebutuhan riil pekerja di lapangan. Berdasarkan nilai ke Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY mencapai Rp3,5 hingga Rp4 juta. Namun UMK DIY pada kisaran Rp2 juta.

"Seharusnya lebih banyak buruh yang berhak mendapat subsidi (BSU) dan memperluas cakupan ke pekerja informal. Ini bisa diperbaharui dengan pendataan partisipatif, mengembangkan sistem digitalisasi, dan integrasi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," terangnya.

"Jika hanya mengandalkan BSU tanpa pembaharuan sistem ketenagakerjaan via revisi UU naker dan perlindungan sosial yang lebih luas, kebijakan ini akan bersifat reaktif, bukan solutif," sambungnya.

Ia juga menyebut nilai BSU juga perlu ditingkatkan. "Disesuaikan dengan indeks biaya hidup daerah atau KHL. Untuk DIY di kisaran Rp3,5 juta (KHL), angka Rp600 ribu terlalu kecil jika dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli," pungkasnya.

**(maw)**